

Bagian IV

Perang Simbol di Senayan

Situs Perbedaan

Ibarat memasuki rumah, kita telah membuka pintu rumah para wakil rakyat di Senayan, DPR RI. Pada bagian kedua, kita bersama-sama melihat DPR sebagai sebuah situs sosial. Kita mendekati DPR tidak dari kaca mata yang besar, melainkan dari pernik-pernik yang mendetail di sana. Beragam jenis orang ada di sana. Namun secara khusus Senayan merupakan situs yang di dalamnya beragam orang tersebut dibedakan dalam kategori dua kelompok besar saja, anggota DPR dan bukan anggota DPR, di dalam kategori yang terakhir ini terdapat para pekerja di DPR dari PNS, asisten pribadi, staf ahli, pamdal, sampai *cleaning service*, juga para makelar proyek, wartawan dan lain-lain. Namun demikian sangat jelas dan terang bahwa pusat dari segala aktivitas di DPR tentu saja para wakil rakyat, yaitu anggota DPR.

Kategori anggota DPR dan bukan anggota DPR diperjelas di dalam situs ini dengan berbagai bentuk perbedaan. Perbedaan akses terhadap fasilitas gedung, dari sejak gerbang kompleks DPR hingga ruang sidang. Akses pintu gerbang depan DPR hanya diperuntukkan bagi mobil anggota DPR, akses mobil tanpa pemeriksaan metal detector hanya berlaku bagi anggota DPR, jalan masuk, hingga tempat parkir anggota DPR berbeda dengan yang bukan anggota DPR. Akses terhadap ruang lobby, bebas dari *metal detector* di lobby depan gedung perkantoran, hingga lift yang nyaman, adalah diperuntukkan bagi anggota DPR. Anggota DPR juga sepenuhnya mendapat fasilitas perpustakaan hingga kesehatan. Sementara yang bukan anggota DPR harap bersabar dengan jalan kaki, pemeriksaan *metal detector* yang berkali-kali, pemeriksaan pamdal yang juga tak cukup sekali, hingga antrian lift yang tidak nyaman.

Pembedaan itu diperkuat dengan dikenakannya tanda-tanda pengenal identitas seperti logo, pin, dan *ID card*. Tanda-tanda itu bahkan bukan hanya menjadi pembeda identitas melainkan menjadi simbol perbedaan status antara anggota DPR dengan yang bukan anggota DPR. Dikenakannya simbol-simbol

identitas itu berimplikasi pada bentuk-bentuk pelayanan khusus, dari seperti bergegasnya pamdal membukakan pintu mobil, lift, hingga pintu koridor lantai.

Bagi saya segala setting fisik ini adalah setting yang didesain untuk memberikan dukungan terhadap penguatan status sebagai anggota DPR. Segala *setting* fisik memberikan implikasi lanjutan dalam bentuk layanan kultural yang menggambarkan relasi kekuasaan yang timpang, yang satu dilayani oleh yang lain, yang satu mendominasi, yang lain tersubordinasi. Relasi kekuasaan yang timpang ini ditampakkan secara kultural, sedemikian halusny sehingga si pelaku subordinat merasa itu sebagai suatu perilaku yang wajar saja ia lakukan terhadap kelas sosial di atasnya yaitu anggota DPR. Saya tegas-tegas menyatakan ini relasi kekuasaan yang timpang, karena di antara keduanya tidak terjadi suatu hubungan timbal-balik yang adil.

Mari kita bedakan situasi seorang pamdal yang dengan melihat logo DPR pada mobil anggota DPR lalu tergopoh-gopoh membukakan pintu, dibandingkan petugas hotel yang membukakan pintu mobil. Petugas hotel melakukannya sebagai layanan terhadap tamu yang nanti akan membayar segala bentuk layanan dan fasilitas pada pihak hotel, ada timbal-balik yang diharapkan. Itu yang tidak terjadi pada para pamdal.

Di luar dari *setting* di atas, anggota DPR sendiri memproduksi suatu bentuk perbedaan simbolik dengan orang lain. Mereka menetapkan perabot makan yang hanya boleh digunakan oleh dirinya. Gelas untuk Ibu/Bapak mestilah gelas yang berbeda dengan yang digunakan untuk tamu atau staf.

Bila perlu mereka juga makan di tempat yang berbeda dari kebanyakan orang. Kafetaria DPR terlebih di ruang khusus VIP, atau kafe-kafe di hotel berbintang yang tak jauh dari kompleks gedung DPR atau tempat berkelas lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian kedua bahwa ini bukan soal pemenuhan kebutuhan fungsional melainkan pemenuhan selera konsumsi yang didasarkan pada pengukuhan status kelas sosial.

Pilihan tempat juga bukanlah semata-mata selera konsumsi subjektif, melainkan juga penyesuaian kepantasan estetika sosial. Penyesuaian sosial merupakan suatu tindakan subjektif yang dilakukan untuk merespon suatu standar

estetika dari lingkungan tempat subjek berada. Di sinilah sesungguhnya berlangsung suatu hubungan antara subjek dengan struktur. Hubungan subjek dan struktur ini tidak berlangsung dalam suasana di mana subjek sepenuhnya memiliki pilihan yang bebas dan juga tidak sepenuhnya di bawah tekanan pemenuhan kewajiban oleh struktur. Saya merasa pendekatan Bourdieu yang menyatakan bahwa subjek dan struktur berhubungan secara relasional lebih tepat dalam menjelaskan fenomena ini. Tawaran Bourdieu mengenai habitus untuk sebagai situasi mental atau struktur kognitif yang melalui itu orang bertemu dengan dunia sosial (Ritzer, George, 1996: 404) membantu saya melihat bahwa pilihan subjek dalam hal ini anggota DPR terhadap tempat makan misalnya, sebagai suatu bentuk penyesuaian subjek (anggota DPR) terhadap struktur di mana mereka berada.

Tindakan penyesuaian anggota DPR dengan estetika sosial kelasnya, sekaligus merupakan tindakan klasifikasi diri terhadap kelas sosial lainnya yang dianggap berbeda atau lebih rendah statusnya daripada diri sebagai anggota DPR. Klasifikasi itu adalah penegasan perbedaan status sosial kelas yang direpresentasikan dengan selera kelas ditampilkan untuk memilah mana selera kelas yang dominan, yang estetik, mana yang tidak. Tanpa sadar klasifikasi yang berlangsung terus-menerus juga akan membentuk suatu standarisasi selera estetika yang dianggap paling bermartabat. Klasifikasi dan selanjutnya standarisasi sekali lagi menegaskan proses produksi suatu bentuk perbedaan sosial yang berlangsung secara simbolik.

Selain sebagai *locus* (tempat) produksi perbedaan yang simbolik, di DPR juga berlangsung sekaligus suatu proses reproduksi perbedaan sosial. Reproduksi itu berlangsung melalui proses dominasi kelas yang sangat halus dan hampir-hampir tak terasa. Dominasi bekerja ke tingkat penerimaan bentuk perbedaan status yang terlegitimasi secara kultural oleh mereka yang didominasi, bahkan hingga mencapai tingkat internalisasi dan reproduksi perbedaan oleh kelas yang didominasi. Sekali lagi, kekuasaan menampakkan secara implisit bahwa ia (kekuasaan) bekerja dengan sangat halus sehingga dominasi kelas dominan dapat dilegitimasi, diterima, diinternalisasi, dan bahkan selanjutnya direproduksi nyaris

tanpa syarat dari pihak yang didominasi. Hanya dengan kekuasaan yang bekerja secara halus dan nyaris tidak kasat mata itulah, standar nilai, estetika dari kelompok dominan dapat dimantapkan.

Hal tersebut secara nyata terlihat dalam relasi antara asisten pribadi dengan anggota DPR tempatnya bekerja. Relasi mereka jelas bukanlah relasi rasional dan karenanya berjalan dengan profesional, melainkan itu merupakan bentuk relasi yang dipengaruhi oleh unsur paternalistik. Unsur paternalistik itu muncul dari penyebutan "Ibu atau Bapak" terhadap anggota DPR. Anggota DPR menginginkan aspri dan staf anggota lainnya memberikan pelayanan kepada dirinya. Tentu saja pelayanan itu tidak didefinisikan sebagai job description yang jelas dan ditujukan untuk memberikan dukungan bagi kinerja pengambilan keputusan sebagai DPR, melainkan muncul dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan harian yang dikerjakan oleh asisten untuk memberikan layanan kepada anggota DPR, dari mengurus jadwal persidangan, transfer uang, membayar rekening listrik dan telepon, hingga membuatkan air minum dan menenteng baju anggota DPR. Anggota juga menginginkan staf untuk menunggunya dalam sidang dan mengawalnya ke mana-mana seperti tugas sopir plus pengawal.

Konsep relasi yang penuh pelayanan ini pada kasus yang digambarkan pada bagian kedua, tidak mendapatkan perlawanan berarti dari aspri atau staf. Sebagian besar mereka justru tak sekedar menerima bahkan menginternalisasikan konsep relasi paternalistik itu ke dalam dirinya. Ini adalah suatu modus di mana kekuasaan sesungguhnya bekerja dalam relasi antara pihak yang mendominasi dengan pihak yang didominasi. Kekuasaan itu bekerja dalam bentuk yang sedemikian rupa halus sehingga mendapatkan lebih dari sekedar membenaran saja, melainkan juga penerimaan dan selanjutnya justru direproduksi. Bourdieu menyebutnya sebagai kekerasan simbolik, dalam Bourdieu (1990: 192); Bourdieu (2001: 1), yaitu suatu skema relasi kekuasaan yang timpang yang berlangsung melalui praktek dominasi yang sangat halus. Dominasi itu berlangsung sangat kultural, sangat sehari-hari, muncul dari mereka yang dianggap memiliki legitimasi sehingga mendapatkan membenaran atas praktek dominasinya. Bahkan dalam penelitian ini, dominasi dari mereka yang dianggap memegang legitimasi

itu bukan saja diterima oleh kelompok yang ter subordinat melainkan juga diinternalisasi dan direproduksi.

Demikianlah maka DPR memanglah sebuah situs yang didalamnya bekerja suatu bentuk-bentuk pembedaan status kelas secara kultural yang juga didukung oleh setting fisik yang mendukung setting pembedaan status seperti gerbang, gedung, jalan, lift, perpustakaan, dan lain sebagainya. Pembedaan tersebut bekerja secara kultural sebab pembedaan itu tidak muncul selalu dalam bentuk kasat mata dan konsep-konsep yang besar, melainkan muncul dalam praktek sehari-hari yang sangat detail, halus dan tidak mencolok perhatian.

Simbol dan Arena Kekuasaan

Selama menuliskan bagian kedua dan ketiga, memang saya merasa bahwa bagian-bagian itu dituturkan temuan muka-belakang, kadang melihat yang di muka, kadang melihat yang di belakang. Yang dengan di belakang terasa agak investigatif namun saya merasa perlu untuk sesekali memperlihatkan sesuatu yang ada di belakang untuk menunjukkan bagaimana simbol yang ditampakkan ke depan itu begitu manipulatif.

Namun demikian saya tidak mau terjebak lama-lama untuk memperhatikan apa yang disembunyikan di belakang. Saya justru ingin saya memperlihatkan segala seluk-beluk perilaku di DPR ke hadapan luar, bukan untuk disembunyikan. Penempatan ini memberikan kemungkinan keleluasaan memandangi bentuk-bentuk perilaku yang secara simbolik dimaksudkan untuk mewakili makna yang ingin disampaikan. Menempatkannya di depan membuat saya memiliki lebih banyak peluang untuk memperkaya interpretasi dan menyusun dugaan makna-makna yang lebih menantang.

Dari depan, saya melihat Senayan seperti ruangan yang bertaburkan simbol-simbol, sangat banyak. DPR menjadi bukan hanya situs sosial tetapi juga situs kultural yang di dalamnya dihuni oleh bentuk-bentuk perilaku estetika berbasis kelas. Kita dapat melihatnya bersama dalam bentuk kebiasaan baru cium pipi kanan dan kiri, rajin-rajin sebut kolega pejabat, penggunaan perhiasan

sebagai pelengkap atribut kostum, pengenalan kostum yang menyiratkan pengenalan eksistensial anggota DPR tertentu. Bukankah itu sesuatu yang kultural sifatnya ?

Pada bagian kedua dan ketiga, sesungguhnya kita telah melihat bagaimana simbol-simbol itu diproduksi, melalui penanda identitas maupun selera konsumsi, bahkan juga bahasa. Yang menantang adalah justru pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana simbol-simbol itu digunakan.

Sebelum sampai pada bagaimana simbol-simbol itu digunakan, ada baiknya kita susun dulu suatu klasifikasi dari simbol-simbol yang digunakan. Klasifikasi ini hanya alat yang saya gunakan untuk mempermudah pembicaraan saja, sebab saya agaknya harus membuat pertolongan pada diri saya sendiri untuk menghadapi temuan-temuan simbolik yang kompleks ini. Jadi memang klasifikasi ini adalah alat bantu buat saya saja, tentu saja dengan demikian sangat terbuka peluang pengklasifikasian lain di luar yang saya buat.

Saya membuat beberapa klasifikasi besar. Pertama saya akan kotakkan sementara kepemilikan benda-benda *handphone* mahal, laptop mahal, mobil mewah, perhiasan mewah, makan di kafe atau hotel mewah, hingga sunatan anak di hotel mewah sebagai suatu bentuk simbolik suatu selera konsumsi kelas yang dengan tampilan selera konsumsi itu ke hadapan publik, diharapkan mampu mewakili secara simbolik status sebagai kelas elite yang menguasai sejumlah modal material yang tentu saja lebih jauh banyak dari kelas sosial lain (yang tak mempunya). Selera konsumsi itu juga dibuat sebagai bentuk upaya penyesuaian standar estetika kelas sosial yang bersangkutan sekaligus membedakannya dari klasifikasi kelas sosial lainnya yang dianggap lebih rendah. Selera konsumsi bahkan kemudian semakin diperbesar-diperbesar untuk memperoleh pengakuan bahwa si empunya mulai meningkatkan statusnya di antara kolega dalam lingkungan sosialnya. Misalnya upaya memperbesar modal secara simbolik ini diperlihatkan oleh tindakan membeli mobil *harrier* baru, *cash* oleh pimpinan baru dalam salah satu fraksi di DPR, terkait posisi politiknya yang meningkat.

Klasifikasi kedua adalah dengan mengelompokkan penyusunan buku, sekolah, kemunculan di media massa baik majalah maupun televisi, dan juga

permainan persidangan sebagai satu klasifikasi tersendiri. Saya mengelompokkan hal-hal itu sebagai sejumlah tindakan simbolik untuk menunjukkan kapasitas diri, kapasitas diri itu diperlihatkan simbol-simbol citra diri, seperti menulis buku dan sekolah yang dimaksudkan untuk memperkuat citra diri sebagai anggota DPR yang terdidik, demikian juga dengan kemunculan di media massa seperti majalah dan TV sebagai upaya memperkuat popularitas, serta keahlian berpolitik di persidangan DPR.

Klasifikasi berikutnya atau yang ketiga adalah mengenai jaringan sosial. Jaringan sosial ini sekali lagi saya tempatkan di bagian muka, sebab jaringan sosial yang saya temukan dalam tesis ini, bukanlah jaringan sosial yang sengaja disembunyikan, melainkan justru ditampilkan ke permukaan. Bahkan beragam cara ditempuh untuk mendapatkan identitas simbolik dari suatu jaringan sosial yang dianggap akan memperkuat posisi dalam ranah politik ini.

Mari kita tinggalkan perdebatan mengenai status pengelompokan yang saya buat itu, kita perlu masuk dalam bagian berikutnya dengan memperhatikan bagaimana simbol-simbol itu digunakan (difungsikan) di dalam lingkungannya. Bersama kita telah melihat bahwa simbol-simbol dalam klasifikasi pertama diperbesar dengan memperbaharui atau memperbanyak variasi konsumsi benda-benda mewah. Dulu anggota DPR mulai menyukai *handphone* komunikator mahal kini komunikator merk terbaru, lalu ditambah lagi dengan kontroversi mengenai laptop mahal. Tak soal bisa atau tidak menggunakannya, yang penting punya laptop mahal. Atau sering-sering makan di kafe atau hotel mewah. Dan tiba-tiba membeli mobil baru yang mahal. Dari selera konsumsi itu, publik mudah menyimpulkan, anggota DPR duitnya banyak. Saya setidaknya sudah menjelaskan dari mana saja uang resmi anggota DPR dan uang tidak resmi anggota DPR. Di luar dari penjelasan kami, pembaca juga tentunya dapat menduga asal uang anggota DPR dengan membaca bertubi-tubi kasus korupsi dan suap yang terjadi di DPR. Berbalik dengan penelitian atau bahkan penyelidikan investigatif yang menunjukkan bagaimana anggota DPR berusaha mendapatkan uang tambahan yang disembunyikan dari wajah publik, saya justru melihat bahwa anggota DPR

justru menampilkan kepemilikan modal materi itu dalam bentuk simbol-simbol kekayaan.

Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sibuk mengendus-endus kekayaan para pejabat, dengan asumsi bahwa mereka menyembunyikan harta kekayaannya. Saya punya pertanyaan yang menggelitik, mengapa disembunyikan, jika ketika ditampilkan itu punya makna penting dalam lingkungan DPR? Tentu saja penguasaan materi kekayaan itu justru ditampilkan karena ada maknanya. Tak perlu seperti menjawab teka-teki silang, ini hal yang sederhana untuk dipahami, karena DPR harus tampil sebagai kalangan elite yang punya banyak uang. "Demokrasi itu mahal " kata Denny Indrayana dalam suatu Rapat Dengar Pendapat Umum di Pansus Pemilihan Presiden Langsung. Dalam demokrasi liberal sekarang ini, uang memainkan peranan penting dalam penentuan posisi politik. Jadi terang saja menjadi penting penampakan simbolik bahwa anggota DPR adalah kelas berduit, kelas yang memiliki modal materi dalam berpolitik.

Anggota DPR perlu untuk menunjukkan simbol itu agar mereka mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari komunitas politik yang memiliki modal material yang besar sehingga yang lain merasa segan dengan kekuatan modal yang ia miliki. Penampakan kekuatan modal material ini bukan lagi sekedar soal penyesuaian diri dalam ranah sosial melainkan penguatan posisi bagi si empunya.

Demikian juga dengan klasifikasi simbol kedua mengenai kapasitas diri. Di samping citra sebagai elite berduit, citra sebagai kelas terdidik, populer, dan berkapasitas politik tinggi juga penting di ranah seperti DPR ini. Kita telah melihat bagaimana citra diri sebagai kelas terdidik itu diproduksi, dengan menyusun buku, tak penting isinya bagus atau tidak, yang penting adalah dengan menerbitkan buku, seolah-olah yang bersangkutan adalah sosok intelektual. Sekolah juga tak jauh beda fungsinya, titel sarjana (SH, Ssi, dan S...lainnya) saja kurang megah dibanding dengan Msi, PhD, Doctor, apalagi Profesor. Popularitas juga merupakan daya tarik dalam komunitas politik. Popularitas itu lebih banyak difungsikan untuk komunikasi ke vertikal, agar dilihat koleganya, agar dilihat pemimpin fraksinya, atau agar dilihat pemimpin partainya. Oleh karena itu

popularitas juga punya makna simbolik yang dianggap penting, sehingga perlu untuk terus-menerus diperbesar. Salah satu caranya dengan rajin-rajin muncul di majalah dan koran, bila perlu membayar.

Klasifikasi simbol kedua ini juga harus diperbesar dengan segala cara yang memungkinkan. Hanya saja yang agak sulit adalah bila sudah berkait dengan soal kemampuan dalam persidangan. Itu bukan hal yang mudah dibuat, bukan hal yang instan atau dapat dimanipulasi seperti jenis-jenis penampakan simbol lainnya. Simbol yang satu ini hanya dapat dikonstruksi dengan rajin-rajin mempelajari teknik persidangan, atau karena latar belakang pengalaman masing-masing anggota DPR. Mereka yang sudah bertahun-tahun punya pengalaman berpolitik yang panjang dan karenanya mumpuni, mereka yang mantan aktivis atau keluarga politisi memiliki kelebihan di sini dibanding anggota DPR pada umumnya.

Dalam konteks yang satu ini, para politisi senior menempatkan diri dalam posisi yang sangat kuat. Sementara bagi kalangan politisi muda dan cerdas membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Pola yang saya lihat dalam persidangan DPR terus-menerus adalah pola permainan posisi antara politisi senior dengan politisi muda yang berupa asistensi proses dan malah dalam beberapa fraksi lebih mirip *blocking* faksional. Seperti sebuah pertandingan kolektif, semua pemain harus bermain dalam skenario kolektif, tidak boleh ada yang *offside* atau mereka yang *offside* harus tersingkir.

Selain dalam kapasitas persidangan, yang demikian ini juga dapat kita lihat dalam penentuan keterlibatan anggota DPR dalam alat-alat kelengkapan tertentu di DPR, seperti di Baleg, komisi, atau pansus tertentu. Keterlibatan dalam alat kelengkapan lain yang dianggap bergengsi atau strategis itu secara simbolik berfungsi untuk melihat posisi diri anggota DPR di dalam arena politik. Apakah yang bersangkutan termasuk kelas pinggiran yang hanya berada dalam komisi dan tidak terlibat dalam alat-alat kelengkapan lainnya, atau yang bersangkutan punya potensi posisi yang penting karena terlibat bahkan mengatur kedudukan anggota-anggota DPR dalam alat-alat kelengkapan DPR. Dari sini kita bisa memahami mengapa posisi di Badan Legislasi menjadi gengsi tersendiri, sebab yang bersangkutan dapat merasa ditempatkan segala aktor potensial yang memiliki

modal kapasitas politik yang lebih dibanding kawan-kawannya. Demikian juga mengapa keterlibatan pansus paket politik, menduduki gengsi yang lebih besar dibanding pembahasan rancangan undang-undang lainnya.

Selanjutnya adalah klasifikasi simbol yang terkait jaringan sosial. Dalam praktek politik di Indonesia jaringan sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama jaringan sosial yang didasari unsur kekerabatan. Kita mudah melihatnya misalnya di PKB dan PDI Perjuangan, ada Gus Dur dan Yenny Wahid, ada Puan Maharani, Taufiq Kiemas dan Megawati. Dalam tesis ini jaringan sosial juga diperlihatkan dalam bentuk jaringan sosial yang berbasis kekerabatan, hubungan primordial (etnis dan agama), keterlibatan dalam *corps*, dan juga kelompok faksi politik.

Jaringan sosial, sebenarnya cukup mudah untuk melihatnya, salah satunya di dalam *curriculum vitae* setiap anggota DPR. Jaringan sosial itu dapat dilihat dalam latar belakang organisasi, asal daerah, bahkan juga nama orangtua, suami, atau keluarga. Namun lebih dari sekedar catatan latar belakang orang, saya justru melihat jaringan sosial itu ditempli makna simbolik yang ditampakkan terbuka ke hadapan publik. Anggota DPR tak selalu menempatkan jaringan sosialnya di catatan kaki atau catatan latar belakang, melainkan justru berusaha keras menunjukkannya di hadapan banyak orang. Jaringan sosial berubah menjadi suatu pelabelan identitas politik, yang dengan label identitas itu anggota DPR berusaha mendapatkan pengakuan, salah satunya "*labelling de corps*" untuk kemudian mengukuhkan penempatan posisi diri di dalam komunitas politiknya. Ketika jaringan sosial dijadikan suatu pelabelan identitas dan selanjutnya ditempelkan kepadanya makna-makna, maka menurut saya seketika jaringan sosial berubah menjadi suatu simbol. Bahkan untuk mendapatkan simbol itu anggota DPR melakukan banyak cara, mereka rajin-rajin menghadiri pertemuan alumni organisasi, rajin memberikan dana kegiatan kemahasiswaan tertentu, hingga pun memasang foto bersama petinggi partai agar dengan itu tercermin relasi kedekatan simbolik antara dirinya dengan petinggi partai. Jaringan sosial sedemikian rupa ketika ditempatkan di wilayah depan, ia memberikan implikasi pemaknaan yang

luas. Jaringan sosial menjadi suatu identitas yang eksklusif bagi aktor-aktor politik.

Oleh karena pengaruh yang besar dari jaringan sosial dalam menentukan posisi aktor politik, maka tak ubahnya simbol-simbol yang lain, anggota DPR berusaha keras untuk memperolehnya bila perlu dengan cara-cara manipulatif, mereka selanjutnya berusaha mempertahankannya, memperbesar terus-menerus serta mengukuhkannya.

Memperhatikan uraian ini, maka segala simbol yang telah kita saksikan ternyata tak semata-mata berfungsi sebagai simbol yang memerantarai hubungan komunikasi si empunya dengan realitas lingkungannya, melainkan lebih dari itu simbol itu ditempatkan sebagai suatu daya tawar simbolik yang turut mempengaruhi perilaku hubungan posisional antara aktor dengan struktur sosial yang tempatnya berada.

Saya merasa berhenti ketika menempatkan simbol sebagai perantara gagasan dengan realitas. Saya hanya terdorong untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan saja. Simbol yang bertebaran dalam penelitian ini tidak berhenti di sana. Simbol-simbol ini termuati oleh daya (*power*) yang membuatnya penting dalam penempatan posisi-posisi para aktor di Senayan. Saya mendapatkan tantangannya ketika Bourdieu memperluas definisi mengenai modal, ia keluar dari term ekonomistik. Modal dijelaskan sebagai relasi sosial (Bourdieu, 1984: 113), Selanjutnya Bourdieu memperluas definisi modal non ekonomistik, memberikan peluang bagi simbol-simbol yang dimuati oleh daya itu mendapatkan tempat untuk bermutasi lebih jauh sebagai kapital yang keberadaannya potensial untuk menentukan susunan konfigurasi posisi-posisi subjek dalam struktur. Asumsi mengenai peran kapital di dalam menentukan susunan konfigurasi struktur akan kita uji dalam pembahasan selanjutnya.

Ketika Bourdieu memperluas pembahasan mengenai modal, yang keluar dari term modal ekonomistik, ia kemudian membuat variasi modal ke dalam bentuk-bentuk variasi yang lebih kultural. Meminjam klasifikasi modal dalam definisi Bourdieu sebagai modal budaya, modal sosial, modal ekonomi, serta modal simbolik. (Fashri, 2007: 98-99), saya menempatkan klasifikasi yang dibuat

ke dalam klasifikasi modal yang disusun Bourdieu, klasifikasi simbol pertama kita merupakan modal ekonomi, klasifikasi kedua adalah modal budaya, dan klasifikasi ketiga adalah modal sosial. Modal simbolik melekat dalam status sebagai anggota DPR dimiliki oleh semua anggota DPR.

Tampaknya kita harus meneruskan pembahasan kita lebih dalam lagi. Tentu saja segala klasifikasi modal tersebut tidak hanya berfungsi untuk penyesuaian semata-mata terhadap lingkungannya atau pun perbedaan terhadap kelompok sosial lainnya. Melainkan mengalami proses yang lebih jauh lagi. Untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi berikutnya terhadap modal-modal tersebut, kita akan melihat kembali para aktor kita dan memasukkan temuan tambahan yang belum mendapat ruang dalam pembicaraan pada bagian kedua dan ketiga sebelumnya.

Mari kita mulai dengan menghadirkan satu per satu tokoh yang ada, tentu tidak semua tokoh, hanya beberapa tokoh, namun saya rasa cukup untuk membantu untuk memperlihatkan bagaimana anggota-anggota DPR itu memainkan segala modal yang ada di dalam ranah ini.

DD, seorang anggota DPR perempuan, memiliki latar belakang akademik yang cukup tinggi dibanding anggota DPR lainnya. Berasal dari keluarga pendidik, namun selain itu baik keluarga, suami dan kerabat-kerabatnya juga memiliki bisnis yang cukup besar. Karena kedudukannya sebagai anggota DPR, ia mempunyai kesempatan untuk membangun ulang jaringan dengan rekan-rekan alumni perguruan tinggi baik yang seangkatan maupun kakak adik angkatan yang kini menduduki jabatan di pemerintahan pusat seperti dirjen dan lain-lain. Mereka saling berkomunikasi dan bahkan sesekali pejabat pemerintah memberikan *gift* dalam berbagai bentuk tentu saja. Ia juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan akses jaringan ke pejabat tinggi pemerintahan lainnya, termasuk menteri-menteri.

Berkaitan dengan kedudukannya itu, maka satu dua keluarganya mulai memanfaatkan *network* yang kini dimiliki DD. Contoh sederhana adalah membukakan akses bagi saudara jauhnya untuk berdagang perhiasan kepada kolega anggota DPR perempuan lainnya yang pada akhirnya menjadi pelanggan.

Tak hanya sekali saudara jauhnya itu mendatangi ruang demi ruang gedung DPR. DD membantu menelpon kolega anggota DPR untuk setidaknya menerima tawaran penjualan perhiasan itu. Tentu tak hanya itu, seringkali keluarganya yang lain meminta bantuannya untuk mempermudah komunikasi dengan pejabat pemerintah maupun anggota DPR koleganya untuk memperlancar bisnis dan urusan lainnya. Rekan-rekan dari universitasnya meminta bantuan juga untuk turut mengajukan proposal kepada pemerintah. Contoh DD ini tentu saja tak hanya terjadi pada DD, tindakan yang sama juga banyak dilakukan anggota DPR lainnya. Dengan membawa nama Bapak atau Ibu anggota DPR, diharapkan urusan proyek dengan pemerintah menjadi lancar.

Masih ingat ND ? Mari kita kembali menengok ND di bagian ketiga dan bagian keempat ini. ND menggunakan relasi sosialnya kepada petinggi partai untuk meraih kedudukan sebagai anggota DPR. Ia juga berusaha kuat mempertahankan posisinya dengan memperluas relasi sosial dengan aktor yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi partai. Kedudukannya sebagai anggota DPR, memungkinkan dirinya untuk memperluas jaringan perkawanannya kepada sesama koleganya terutama di panitia anggaran. Hubungan baik dengan kolega panitia anggaran memberinya jalan untuk memasukkan proposal dari kolega pejabat daerah tertentu agar segera mendapatkan budget negara (APBN). Biasanya atas tindakan 'baiknya' ini, ND mendapatkan ungkapan terima kasih termasuk yang berupa materi, stafnya menyebutnya sebagai 'fee.' ND menggunakan modal sosialnya untuk meraih modal simbolik dan dengan modal simboliknya ia mencoba memperbesar modal ekonominya.

Hal lain dilakukan NL yang karena statusnya sebagai anggota DPR, ia mendapat kesempatan besar untuk mengakses pejabat-pejabat daerah dan meminta uang dengan alasan untuk keperluan-keperluan tim dalam komisi. Dengan cara itu ia memperkaya diri. Selain itu, NL juga menyusun sebuah buku dan terakhir saya melihatnya muncul dalam salah satu acara televisi sebagai salah satu figur perempuan tokoh. Tak lupa ditampilkan pula *setting* rumahnya yang ditata apik menjadi *background* wawancara. Ia melengkapi statusnya sebagai

anggota DPR dengan memperkaya diri dan memperkuat citra diri serta menambahkan popularitasnya.

Tentu tak hanya DD, ND, dan NL yang melakukan hal demikian. Mereka melakukan konversi dari modal simbolik yang kemudian digunakan untuk mendapatkan modal ekonomi. Banyak orang yang setelah menjadi anggota DPR memiliki kesempatan memperkaya diri. Mereka juga dapat menggunakan modal simboliknya untuk memperkuat modal budayanya melalui popularitas. Selanjutnya tanpa ragu sejumlah modal-modal tersebut diakumulasi bersama.

Beberapa anggota DPR merupakan orang yang berlatar belakang pengusaha kaya, salah satunya FN, memiliki perkebunan besar. Kata para koleganya di DPR dan juga para staf, uangnya banyak sekali. Ia juga terlibat sebagai salah satu petinggi organisasi *underbouw* partainya. Ia diduga banyak orang, memberikan banyak sumbangan uang kepada partai dan petinggi-petinggi partai atau fraksi. Melalui itu ia mendapatkan posisi sebagai salah satu pimpinan komisi dan mempertahankan kedudukannya. Sebagai salah satu pimpinan komisi ia pun mendapatkan banyak kesempatan untuk berhubungan dengan kolega pejabat pemerintah pusat dan juga daerah. Akses terhadap pejabat daerah seringkali dimanfaatkan bukan saja dirinya melainkan juga asistennya untuk mendapatkan pendapatan tambahan. FN juga sangat royal dan tak segan-segan memberikan uang tambahan pada staf-staf lainnya.

Sementara itu ada pula anggota DPR yang berusaha keras memperkuat jaringan sosialnya terus-menerus. Mereka mengelompok menjadi sebuah faksi politik. Faksi ini adalah sebuah jaringan yang keterlibatannya sangat longgar berdasar persamaan-persamaan kepentingan. Keterlibatan dalam faksi akan memperkuat posisi politik di dalam fraksi mereka masing-masing.

Salah satunya SH, ia menunjukkan bahwa modal ekonomi tak selalu memegang peranan paling besar dalam merebut, dan mempertahankan posisi di dalam ranah politik. Modal budaya dan modal sosial juga memegang peranan yang besar. SH menunjukkan itu, ia hanyalah mantan aktivis LSM yang punya bisnis sampingan kecil saja, berdagang ayam. Tetapi SH mampu meraih kedudukan sebagai anggota DPR. Melalui jaringan-jaringan sosial yang

diikutinya, termasuk faksi politik yang sangat longgar itu, ia menduduki posisi sebagai salah satu pimpinan fraksi. SH tidak menggunakan status sebagai anggota DPR untuk memperkaya diri, melainkan menggunakannya untuk memperlebar jaringan sosialnya ke atas dan ke bawah. Ia terlibat dalam organisasi *underbouw* partai tertentu yang di dalam keanggotaan organisasi tersebut putra-putri para pendiri dan petinggi partai terlibat pula. Dengan melibatkan dirinya ke dalam organisasi tersebut, ia hendak memperkokoh jaringan sosialnya kepada kelompok pemegang unsur kekerabatan yang kuat terhadap pemimpin-pemimpin partai. Dengan cara itu pula maka ia mengamankan posisinya di dalam ranah politik ini.

Yang menarik adalah salah satu pimpinan partai kita yang memiliki mobil baru gress *harrier* itu, ia menggunakan simbol pelabelan '*de corps*', ia juga tak ragu menunjukkan simbol kekayaan materi yang ia punyai. Ia memperkuat posisi dirinya dengan faksi politik intern di dalam fraksi dan partai, lalu setelah dengan pergeseran posisi di fraksi ini, ia segera saja menduduki jabatan sebagai pimpinan fraksi. Ia juga melengkapi diri dengan kemampuan orasinya di depan banyak orang. Fisiknya yang tinggi besar dan gendut, suaranya yang besar dan lantang mendukung penampilan orasinya itu. Saya pernah melihatnya berbicara di depan forum, di atas podium suaranya menggelegar, dadanya membusung. Kemampuan orasinya yang didukung oleh suaranya yang menggelegar, rupanya memberikan cukup daya pengaruh terhadap orang-orang di dalam kegiatan fraksi atau partai. Ketika saya datang ke ruangan kerjanya, ia telah mendesain ulang ruangan kerja dari anggota DPR sebelumnya yang ruangnya ia gantikan. Ruangan dalam yang dulunya difungsikan untuk ruangan tamu yang santai dan bersahabat, kini diubah menjadi ruang kerja dengan meja besar langsung menghadap ke pintu. Ia duduk angkuh di belakang meja. Luar biasa tokoh kita yang satu ini. Ia mengakumulasi modal-modal ekonomi, sosial, budaya, untuk memperkuat posisinya.

Melalui contoh-contoh di atas saya ingin mengungkapkan tiga hal, pertama terjadi pembesaran modal-modal. Modal tidak berada pada situasi diam, melainkan terus-menerus mengalami pertumbuhan atau pembesaran porsi. Kita melihat cara beroperasinya pertumbuhan modal dalam bagian ketiga dan keempat ini. Kedua, modal-modal tersebut mengalami konversi. Konversi modal terjadi

secara bervariasi. Bahwa sesungguhnya juga terjadi perubahan modal ekonomi kepada modal simbolik, dan sebaliknya juga posisi modal simboliknya itu digunakan untuk memperbesar kembali modal ekonomi. Juga dapat pula terjadi modal simbolik dan ekonomi berkonversi menjadi modal budaya. Sementara modal sosial juga dapat mendorong seseorang meraih modal simbolik. Kesimpulan saya, konversi modal memang tidak berjalan linier dari modal ekonomi, sosial, budaya menjadi modal simbolik, tetapi dapat pula terjadi sebaliknya, saling bertimbal-balik. Konversi timbal-balik ini juga memberikan dukungan terhadap pembesaran modal-modal secara signifikan. Ketiga, adanya proses akumulasi modal-modal ekonomi, budaya, sosial, dan juga modal simbolik, dalam bagian sebelumnya kita telah melihat bahwasanya masing-masing anggota DPR melakukan akumulasi modal-modal itu.

Saya tergoda untuk melanjutkan dengan mempertanyakan apa guna dari pembesaran, konversi, dan akumulasi modal tersebut bagi para subjek? Semua itu digunakan untuk menentukan posisi subjek di dalam struktur (Stokke, Kristian: 9). Posisi-posisi para subjek itu menggambarkan bentuk susunan konfigurasi struktur. Pembesaran, konversi, dan akumulasi modal digunakan para subjek untuk memperoleh, mempertahankan, bahkan merebut posisi baru yang lebih tinggi dan lebih kuat di dalam konfigurasi struktur tersebut.

Pemaparan ini memperjelas pendekatan mengenai kekuasaan dalam situasi yang baru, di mana kekuasaan tidak melekat pada status subjek. Demikian pula dengan posisi, pemaparan ini menegaskan bahwa posisi tidak melekat pada status kedudukan politik seseorang. Posisi itu adalah kedudukan subjek yang ditentukan oleh kemampuannya mengakumulasi penguasaan modal. Kemampuan subjek untuk mengakumulasi modal tidak senantiasa tetap melainkan terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini adalah karakter khusus modal yang penuh dinamika yang senantiasa bergerak dan berubah, sekali waktu mendapatkan pembesaran sekali waktu mengkonversi, sekali waktu boleh jadi tiba-tiba berkurang porsinya. Posisi setiap subjek di dalam struktur dengan demikian mengikuti gelombang perubahan porsi-porsi pembesaran, konversi dan akumulasi modal yang ia miliki.

Struktur dengan demikian tidak dapat digambarkan sebagai suatu konfigurasi yang *ajeg*, melainkan terus saja berubah-ubah. Struktur seperti sebuah jaringan posisi-posisi yang longgar, tidak solid, tidak tetap. Di dalamnya melekat dinamika gerak yang terus-menerus.

Penjelasan Bourdieu mengenai struktur direpresentasikannya melalui apa yang disebutnya sebagai ranah (*field*). Berbeda dengan habitus yang sifatnya subjektif. Ranah merupakan jaringan, network, konfigurasi dari relasi objektif di antara posisi. (Bourdieu and Wacquant, Loic, 1992: 97) mengatakan :

"...these positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents, or institutions, by their present and potential situation in the structure of the distributions of species of power (or capital) whose possession command acces to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objectively relation to other positions (domination, subordination, homology, ect)..."

Ranah juga merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan. (Fashri, 2007: 95). Tentu saja sebagai konsekwensi arena yang kontestatif seperti itu pasti ada dominasi dan juga subordinasi. Dalam penjelasan mengenai ranah ini Bourdieu sama sekali tidak khawatir menggambarkan ranah sebagai suatu arena kontestasi kekuasaan yang tentu saja sangat *conflicting*. Setiap subjek di dalam ranah dituntut untuk melakukan perjuangan dalam menentukan posisi dirinya, mereka berjuang mendapatkan posisi, mempertahankan dan meningkatkan posisinya. Perjuangan ini merupakan perjuangan simbolik, suatu upaya Bourdieu untuk menggeser reduksi perjuangan kelas yang ditawarkan Marx.

Kini saya mendapatkan kesan gambaran ranah dengan cara pengibaratan, seperti membayangkan bahwa DPR ini suatu situs yang dipenuhi diramaikan dengan gemerlap perang bintang. DPR seperti langit yang menjadi medan perang bintang itu. Seperti itulah suasana di DPR ini, seperti suatu medan perang simbol-simbol. Ia seperti medan daya magnetik berkekuatan tinggi yang menarik semua

simbol ke dalamnya secara dinamik. Kadang ada bintang yang bersinar sangat terang dan besar, kadang bersinar samar-samar di kejauhan.

Tak semua anggota DPR mampu mengakumulasi semua modal yang ia miliki. Kemampuan akumulasi mereka pun berbeda-beda. Ada yang memiliki modal sosial lebih besar dibanding porsi modal ekonominya. Ada yang memilih memperbesar modal ekonominya mumpung jadi anggota DPR. Bermacam-macam. Kemampuan akumulasi simbol itu digunakan sebagai daya tawar di dalam perang simbol tersebut.

Siapa paling besar porsi modal-modalnya, dia akan memantapkan posisinya di dalam medan daya-daya simbolik ini. Semua orang memperebutkan posisi dalam medan daya ini. Ada yang di tengah, ke atas, di samping, dan seterusnya. Kedudukan mereka tidak pernah tetap, mereka dapat saja tiba-tiba terpelanting ke samping. Semuanya bergerak, setiap posisi tidak ada yang tetap, selalu berubah secara dinamis. Seperti sebuah spiral yang melingkar-lingkar mengerucut ke atas. Setiap orang dengan kekuatan akumulasi modalnya masing-masing menempatkan posisinya secara dinamik. Siapa kuat dia akan bertahan, siapa tak mampu dia akan tersingkir. Dia yang kuat akan terus-menerus memperkuat diri, terus-menerus.

Pertanyaan berikutnya yang hinggap di benak saya adalah apa yang terjadi selanjutnya apa yang dilakukan subjek dengan perolehan posisi itu di DPR? Pertanyaan ini untuk mengingatkan bahwa pembicaraan kita tak selesai setelah mencapai pembahasan mengenai posisi subjek dalam struktur. Pembesaran, konversi dan akumulasi modal-modal dilakukan bukan sekedar untuk mencapai pengakuan akan posisi dan kemudian diam. Posisi adalah representasi dari porsi kekuasaan yang dapat diraih sementara waktu saja oleh subjek. Kedudukan dalam posisi tertentu memberikan peluang bagi subjek untuk menyebarkan pengaruh, memproduksi wacana, dan selanjutnya memperkuat dominasinya terus-menerus. Ia seperti posisi yang tiada punya keberakhiran, seperti suatu hasrat ambisi tak ada habis-habisnya. Terus-menerus mendesak si pemiliknya untuk meraih lebih dan lebih lagi. Suatu dialektika yang tidak berkeakhiran. Di atas langit masih ada langit.

Bahasa dan Kekuasaan

Selain simbol-simbol yang sudah kita bahas di atas, saya punya pertimbangan untuk memasukkan secara khusus pembahasan mengenai bahasa dalam tesis ini, disebabkan bahasa mendapatkan porsi besar dalam temuan penelitian ini.

Sebagai pembuka saya ingin mengajak untuk melihat kembali pada bagian ketiga terutama bagian yang menceritakan mengenai persidangan DPR, kita menyaksikan bahasa bertebaran di dalam ruang sidang dan menjadikan ruang sidang disemarakkan oleh hiruk-pikuk permainan bahasa. Bahasa digunakan sebagai atribut penanda identitas, penyampai pesan-pesan bersayap penuh makna, serta menjadi ciri khas karakter style gaya bahasa.

Sebagai atribut penanda identitas, bahasa menyatakan simbol identitas kelompok. Subjek yang berada dalam kelompok (fraksi) itu menunjukkan simbol-simbol penanda identitasnya termasuk melalui bahasa. Para subjek yang terlibat di dalam kelompok tersebut harus melakukan penyesuaian dengan menggunakan simbol-simbol utama identitasnya kelompoknya. Kita sudah melihatnya pada bagian ketiga dari tesis ini, sehingga paragraf ini adalah usaha mengingatkan ulang. Seorang anggota FPKB tidak mungkin akan mengucapkan salam pekik 'merdeka.' Salam 'merdeka' bukan hanya identitas suatu komunitas politik (partai) PDI Perjuangan. Karakter berbahasa orang Golkar berbeda dengan karakter berbicara orang PDI Perjuangan. Dalam PDI Perjuangan, saya mengamati, para subjek berusaha benar untuk menyesuaikan diri dengan karakter berbahasa menggebu-gebu dengan pekik keras sambil mengepalkan tinju. Jadi dalam berbahasa pun anggota DPR melakukan tindakan penyesuaian diri. Anggota DPR yang dulu berasal dari partai lain yang kemudian masuk ke partai PDI Perjuangan, tampaknya melakukan penyesuaian dengan karakter bahasa ini.

Selain sebagai penanda identitas bahasa juga merupakan penyampai pesan-pesan bersayap. Dengan demikian bahasa tidak menanggung dirinya sendiri, tidak menanggung beban tata bahasa dan kerumitan linguistiknya sendiri, melainkan juga menanggung beban pesan-pesan antara penutur dengan lawan bicaranya. Pesan tersebut dapat merupakan suatu sindiran maupun pesan-pesan bersayap atau

bermakna ganda lainnya. Kita juga sudah melihat bentuk-bentuknya dalam bagian ketiga yang lalu.

Retorika penuturan bahasa merepresentasi karakter gaya bicara khas dari penuturnya bahkan juga pola-pola yang sama ditengarai menjadi karakter kolektif gaya bahasa suatu kelompok politik tertentu. Dengan demikian bahasa ditempatkan sebagai atribut karakter khas bagi subjek maupun kelompoknya.

Dalam fungsinya sebagai penanda identitas, penyampai sindiran dan pesan-pesan bersayap, serta penanda karakter khas gaya bicara penuturnya, maka di sini bahasa difungsikan sebagai suatu atribut bagi penuturnya. Termasuk ketika anggota DPR juga terampil memainkan bahasa sebagai atribut penekan dalam pertarungan untuk memenangkan perbedaan pandangan politik. Contoh paling sering kita lihat adalah pada fenomena interupsi yang bertubi-tubi dalam sidang paripurna itu.

Keterampilan lain yang ditunjukkan anggota DPR adalah keterampilan memainkan retorika yang empatik, simpatik, bahkan membangkitkan emosi, adalah suatu gaya permainan bahasa yang menakjubkan, membuat terpesona setiap pendengarnya. Pesona menyembunyikan pengaruh yang dititipkan melalui bahasa agar mendapatkan respon dan bahkan penerimaan dari publik. Anggota DPR sebagaimana ditampilkan dalam bagian ketiga, menunjukkan kemampuannya dalam menarik simpatik publik dan juga mempengaruhi opini publik. Retorika adalah seni mempengaruhi, sementara pengaruh itu menyimpan modus operasi kekuasaan yang sangat halus.

Kekuasaan nyaris tidak dapat dihindari dalam praktek bahasa. Berkali-kali pada bagian sebelumnya dinyatakan bahwa bahasa tidak berada dalam situasi otonom melainkan dimuati pula beban unsur-unsur lain di luar kerumitan bahasa sendiri. Untuk memperjelas, mari kita ulang kembali temuan-temuan dalam bagian kedua dan ketiga yang lalu untuk mengingatkan beberapa pelajaran penting agar tak terlewatkan. Dalam bagian kedua diperlihatkan bahwa bahasa merepresentasikan status kedudukan si penuturnya. Hanya pimpinan pimpinan DPR yang berhak membuka sidang paripurna DPR, mengucapkan salam pembuka dan mengetukkan palu. Ucapan pembukaan sidang hanya memiliki kekuasaan

untuk membuat anggota yang lain diam dan melegitimasi berjalannya sidang karena penuturnya memiliki status sebagai pimpinan DPR. Ucapan yang sama menjadi tak berkekuatan bila diucapkan oleh anggota DPR lainnya. Jadi kekuatan legitimasi ucapan melekat pada status dan otoritas penuturnya.

Hal yang sama terjadi dalam hubungan antara anggota DPR dengan kepala BPN. Karena permintaan disampaikan oleh anggota DPR memiliki daya tekan kepada Kepala BPN sehingga Kepala BPN dengan serta merta mengirimkan dokumen hingga 6 *pick up*. Tanpa otoritas status itu, tak mungkin Kepala BPN mengirimkan dokumen 6 *pick up* itu.

Menengok sebentar Ricouer (1981: 134), ia tampaknya mengambil sebagian penjelasan Austin untuk memperkaya penjelasannya mengenai teori bahasa. Ricouer meminjam penjelasan Austin mengenai *speech-act*, ia hanya menerangkan apa yang terjadi dalam berbicara, ia menyebut salah satunya sebagai *perlocutionary*, suatu implikasi dari tindakan berbicara (*speaking*), "*what we do by the fact that we speak*", bila kita mengatakan 'buka pintu' maka kalimat yang muncul dari mulut itu memiliki implikasi pada tindakan yang mungkin dilakukan dari kalimat 'buka pintu' itu. Dugaan saya Ricouer ingin menjelaskan bahwa tindakan berbicara melibatkan bukan saja tindakan berbicara, tetapi juga apa yang dilakukan dalam berbicara, dan apa implikasinya tapi menarik variasi-variasi yang muncul dalam tindakan berbicara itu ke dalam wilayah yang objektif saja. Bahasa ditempatkan ke dalam situasi yang terasing dari realitas di sekitarnya. Sebab walaupun sudah memulai penjelasan mengenai bahasa yang dapat menimbulkan stimulus implikatif dari suatu tindakan berbicara, namun mengembalikannya ke dalam diskursus yang objektif di dalam bahasa itu sendiri. Mereka ragu untuk memberi tempat bagi adanya unsur otoritas eksistensi dan kekuasaan dalam tindakan berbicara.

Bourdieu (1991: 107-109) mengkritik keterasingan bahasa yang mengucilkan dirinya sendiri, sibuk di dalam menerangkan dirinya sendiri. Padahal bahasa sesungguhnya memiliki hubungan dengan situasi eksternal di luar bahasa itu sendiri. Salah satu dari situasi eksternal dalam bahasa adalah dilekatkannya bahasa status penuturnya yang dengan melekatnya bahasa ke dalam status

penuturnya maka bahasa memiliki kekuasaan yang terlegitimasi oleh otoritas dalam status tersebut. Hubungan bahasa dengan otoritas status penutur disampaikan ulang oleh Thompson, B John dalam pengantarnya pada *Language and Symbolic Power* (Bourdieu, 1991: 8-9). Sebagaimana dalam contoh yang kita saksikan, hanya pada pimpinan DPR kalimat pembukaan sidang memiliki legitimasi dan karenanya mendapatkan kepatuhan dari anggota sidang lainnya. Bila kalimat yang sama diucapkan oleh orang selain pimpinan, maka ucapan tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan memiliki pengaruh untuk dipatuhi. Juga hanya karena anggota DPR yang meminta, maka Kepala BPN memenuhi permintaan itu. Dengan demikian bahasa tidaklah terlepas dari otoritas eksistensi status di penuturnya.

Bourdieu (1991) juga berani memberikan tempat bagi unsur kekuasaan di dalam bahasa. Ia menolak posisi netralitas bahasa. Pertukaran bahasa tanpa ragu mengeksresikan relasi kekuasaan antar subjek, Thompson, B John dalam (Bourdieu, 1990: 1) Seperti dalam konteks hubungan DPR dengan Kepala BPN, maka bahasa menjadi perantara hubungan kekuasaan antara dua institusi tersebut. Relasi kekuasaan secara kelembagaan antara DPR dan BPN membuat permintaan anggota DPR memiliki daya paksa. Ini merupakan praktek dominasi dalam hubungan kekuasaan yang direpresentasikan melalui bahasa.

Bahasa memang merepresentasikan hubungan kekuasaan antara penutur dan lawan bicaranya. Para staf menyebut anggota DPR dengan penyebutan 'Bapak dan Ibu' yang seterusnya melambangkan relasi yang timpang antara keduanya. Yang menuturkan memberikan penghormatan kepada lawan bicaranya. Ucapan itu akan berbeda pengaruhnya dengan ucapan 'Bapak/Ibu' yang diucapkan oleh sesama anggota DPR.

Paragraf di atas memperlihatkan bahwa bahasa tidak dapat membebaskan dirinya dari posisi subjek penuturnya. Relasi kekuasaan dalam bahasa melekat dalam eksistensi diri penuturnya. Penyebutan bapak dan ibu merepresentasikan hubungan penutur sebagai subordinat ketika itu diucapkan oleh staf anggota DPR kepada anggota DPR.

Posisi penutur bahasa menentukan porsi kekuatan bahasa. Kita seringkali disugahi tontonan melalui layar televisi, betapa hiruk-pikuk sebuah sidang paripurna DPR. Mereka yang menginterupsi dan bicara tak selalu merupakan pihak yang kata-katanya menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Saya telah menceritakan bahwa interupsi-interupsi itu hanya atribut yang melengkapi hiruk-pikuk sidang. Sementara yang sungguh-sungguh diperhatikan adalah kalimat yang meluncur dari pimpinan-pimpinan fraksi-fraksi di DPR.

Jadi tak semua bahasa memiliki menyimpan daya (*power*) yang sama. Apa yang dituturkan anggota DPR biasa tidak sama dayanya dengan apa yang dituturkan oleh pimpinan fraksi. Rupanya kekuatan bahasa juga melekat pada posisi-posisi subjek penuturnya. Penutur yang memiliki posisi lebih tinggi dibanding anggota DPR pada umumnya, maka tuturan yang disampaikan memiliki pengaruh yang lebih besar. Namun setiap subjek dapat memperbesar kekuatan bahasanya seiring dengan meningkatnya posisi yang bersangkutan di dalam struktur. Subjek dengan mempertinggi posisi politik ia juga memperbesar daya/power di dalam apa-apa yang diucapkannya.

Sebaliknya kemampuan bermain bahasa juga dapat memperbesar modal budaya yang dimiliki subjek penuturnya. Dengan kemampuan berbahasa, bersilat kata, meyakinkan orang, posisi subjek mengalami pertumbuhan modal budayanya. Kemampuan berbahasa mewakili kemampuan bertransaksi ide, gagasan, dan kepentingan politik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian ketiga bahwa bahasa merepresentasikan suatu keadaan transaksi kepentingan. Bila bahasa adalah alat transaksi kepentingan, maka terbuka peluang bagi subjek yang mampu menggunakan bahasa sebagai transaksi kepentingan untuk menambahkan sejumlah modal budaya dalam penguasaannya. Dengan itu pula ia dianggap memiliki modal yang harus diperhitungkan oleh kolega-koleganya, sehingga subjek yang bersangkutan mendapatkan suatu posisi tertentu di dalam ranah kontestatif ini. Kemampuan ini tak dimiliki sembarang orang, dibutuhkan pengalaman yang mumpuni. Besarnya pengaruh dari aktor-aktor yang memiliki modal ini, telah dicontohkan dalam bagian ketiga bahwa terdapat aktor-aktor yang

memiliki modal budaya yaitu keterampilan bernegosiasi kepentingan politik, yang lebih besar dari pimpinan-pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi pun tidak dapat mengambil keputusan sebelum aktor-aktor tersebut mencapai kesepakatan.

Pembahasan ini menjelaskan kedudukan bahasa sebagai salah satu kategorisasi dalam modal budaya. Sebagai modal, bahasa juga mengalami proses pembesaran daya dan mendapatkan pengaruh atas konversi modal yang lain.

Selanjutnya mengulang bahasa sebagai medium bagi pertarungan simbolik, sebuah pertarungan yang tidak terbuka. Di dalamnya antar satu pihak dengan pihak lain berusaha memantapkan dominasinya. Sebagaimana MW dalam bagian ketiga, melalui pernyataan klaimnya sebagai "orang hukum" dan seterusnya mengungkapkan argumentasinya, sebagai praktek relasi kekuasaan melalui klaim pengetahuan maka sesungguhnya ia sedang menggunakan kekuasaan klaim pengetahuan untuk bukan hanya mendapatkan legitimasi bagi argumentasinya, melainkan juga secara halus, sedang melakukan dominasi wacana terhadap publik yang menjadi lawan bicaranya. Hal yang sama juga dilakukan banyak anggota DPR lainnya. Pada dasarnya mereka sedang mempertarungkan kekuatan dominasi wacana, wacana mana yang paling dapat diterima. Kesepakatan bahasa di dalam pasal-pasal dengan demikian sesungguhnya menyimpan pertarungan kepentingan. Kesepakatan bahasa yang transaksional itu dengan demikian memang multi interpretasi, sebab masing-masing asal kata dalam bahasa itu dimuati oleh kepentingan. Interpretasi mana yang kemudian mengemuka kepada publik, juga tergantung oleh dominasi wacana pihak tertentu yang menguasai alat-alat penyebarluasan wacana lebih jauh.

Pasca reformasi 1998, memberikan kita kesempatan yang lebih terbuka dalam menyaksikan pertarungan wacana-wacana antar kelompok kepentingan, dalam hal ini diwakili fraksi-fraksi di DPR. Suatu suasana yang tak dapat kita saksikan di masa orde baru. Pertarungan wacana itu berlangsung dalam situasi yang sangat terbuka. Yang menarik lagi adalah bahwa wacana yang berkembang di dalam persidangan menunjukkan keterbukaan terhadap situasi eksternal di luar DPR. Wacana yang berkembang di luar DPR secara aktif mempengaruhi dinamika wacana di dalam internal DPR. Sebagai contoh adalah soal kritik poco-

poco yang disampaikan Megawati, yang sesungguhnya merupakan wacana di luar dari dinamika internal DPR sendiri, yaitu kritik yang disampaikan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden. Namun secara dinamik wacana itu diserap dan ditempatkan dalam konteks baru dalam wacana di DPR.

Contoh itu menunjukkan bahwa dinamika wacana di parlemen tak selalu berada pada posisi tertutup terhadap wacana dari luar parlemen, juga bukan merupakan wacana satu arah di mana DPR adalah sentrum yang memberikan wacana ke luar Senayan, namun menutup diri dari publik di luar. Walau pun tak selalu suasana di dalam sidang mencerminkan publik di luar Senayan, namun sedikitnya situasi perubahan mendorong terbukanya kesempatan bagi situasi eksternal memberikan pengaruh dan beradu wacana dengan situasi internal Senayan. Seperti isu quota politik perempuan 30%, adalah suatu perkembangan di mana dinamika wacana internal DPR mampu menyerap dan mengakomodasi wacana eksternal. Ini suatu situasi maju yang menempatkan wacana eksternal dan internal dalam suasana saling mempengaruhi.